



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jln. Pahlawan Rawang Painan No. Telp. (0756)

email dperkimtanps@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 600/ 03 / S-Kep/ Perkimtan-PS/I / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KEGIATAN ANGGARAN DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Kegiatan Anggaran Tahun 2019 dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan APBD Anggaran Tahun 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 43 /KPTS/BPT-PS/2019, tanggal 28 Januari 2019, **tentang** Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/Kpts-BPT-PS/2009 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama-nama terdapat pada lajur 5 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Anggaran Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- Kedua : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut;
a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yang mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya diteruskan kepada Pengguna Anggaran.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sepanjang tersedia.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 29 Januari 2019
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan,



Tembusan disampaikan Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Sdr. Bendahara/ Pemegang Kas dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
8. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 600/ 03 /Perkimtan-Ps/ I /2019

TANGGAL : 29 JANUARI 2019

**TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KEGIATAN ANGGARAN DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	PPTK	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5	6
1	MUKHRIDAL, SH NIP. 19640128 199309 1 001	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang		
2	ROLI BUCHARI, ST, MT Nip. 19750417 200501 1 013	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan Alat tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 12 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Pengadaan Meubiler 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Pelaksanaan Promosi dan Publikasi

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	PPTK	KEGIATAN YANG DIKELOLA
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
				POPPY MAYASARI, ST	1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
				POPPY MAYASARI, ST	2 Sinkronisasi Program RPJM Cipta Karya
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
				POPPY MAYASARI, ST	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3	FIONNA MIRZAL,ST NIP. 197805152006041016	Kabid. Perumahan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran		Program Lingkungan Sehat Perumahan
				EDRUSPARDI, ST	1 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
				EDRUSPARDI, ST	2 Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
				YOGI QADARMINTO, ST	3 Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Perumahan
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
				EDRUSPARDI, ST	1 Pembangunan Gedung Kantor
				EDRUSPARDI, ST	2 Pembangunan Rumah Dinas
				EDRUSPARDI, ST	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas
					Program Pengembangan Perumahan
				PITPUSPITA, ST	1 Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan
				YOGI QADARMINTO, ST	2 Penunjang Perumahan Permukiman & BSPS
				EDRUSPARDI, ST	3 Rehap Rumah Tidak layak huni
				PITPUSPITA, ST	4 Pendataan dan Validasi data Rumah tidak layak huni
				EDRUSPARDI, ST	5 Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
				PITPUSPITA, ST	6 Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak
				EDRUSPARDI, ST	7 Penunjang Pembangunan Rumah Khusus Nelayan
				YOGI QADARMINTO, ST	8 Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni
				PITPUSPITA, ST	9 Fasilitasi Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
4	BERISKHAN, S.Sos. M.Si NIP. 197203021993021001	Kabid. Pertanian	Kuasa Pengguna Anggaran		Program Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan dan
				ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP. MM	1 Perencanaan Pengadaan Tanah
				ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP. MM	2 Persiapan Pengadaan Tanah
				ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP. MM	3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah
				ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP. MM	4 Penyerahan hasil Pengadaan Tanah

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	PPTK	KEGIATAN YANG DIKELOLA
				ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP. MM	5 Fasilitasi Pengadaan Tanah
				ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP. MM	6 Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
				Drs. IRWANSYAH	7 Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah
				Drs. IRWANSYAH	8 Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah
				YENEDI, S.Sos	Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan 1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan
				Drs. IRWANSYAH	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 1 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
5	RUDI ANWAR, ST NIP. 19740129 200804 1 001	Kabid. Kawasan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran	HENDRA ARMAN, ST HENDRA ARMAN, ST	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 2 Pembangunan Jalan Minapolitan
				IKHWAN WILDANI, ST	Program Saluran Drainase / Gorong - Gorong 1 Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman
				HENDRA ARMAN, ST	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 1 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman
				IKHWAN WILDANI, ST	2 Penataan Kawasan Kumuh
				HENDRA ARMAN, ST	3 Penyusunan DED Kawasan Kumuh
				HENDRA ARMAN, ST	4 Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman
				IKHWAN WILDANI, ST	5 Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh
				EKA HASMATATI PUTRI, ST	6 Penunjang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
				HENDRA ARMAN, ST	7 Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kab. Pesisir Selatan

Painan, 29 Januari 2019
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan.


MOKHRI DAL, SH
Pembina Utama Muda Tk. I NIP. 19640128 199309 1 001